



PARADIGMA MASYARAKAT TENTANG DEMOKRATISASI PENDIDIKAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Zaenal Akhmad, Andi Rahmatia

² FISIP, UPRI Makassar

Email: zaenalakhmad64@gmail.com

² FKIP, UPRI Makassar

Artikel info

Proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap kualitas pelajar. Sistem yang demokratis akan menempatkan segala hal menjadi sangat relatif dengan demikian kehendak untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya akan menjadikan peserta didik lebih pro aktif dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ini hanyalah salah satu poin terkecil dari sekian banyak hal dalam sistem pendidikan yang perlu untuk didemokratisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat paradigma masyarakat tentang demokratisasi pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah survei, yaitu dengan terjun langsung ke obyek penelitian, sedangkan tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Penarikan sampel dari populasi tersebut menggunakan metode purposive sampling

Berdasarkan hasil Penelitian, Demokratisasi pendidikan di Kabupaten Bulukumba belum menyentuh wilayah hakiki dari konsep demokrasi. Demokrasi yang sesungguhnya adalah milik masyarakat luas secara utuh dan bulat. Tetapi desentralisasi pendidikan sebagai salah satu upaya dari konsep demokrasi untuk menyentuh subyeknya secara benar dan hakiki belum mampu diwujudkan. Demokratisasi pendidikan khususnya di Kabupaten Bulukumba tetap berbau sentralisasi manajemen pendidikan kedaerahan masih menjadi milik pemerintah daerah dan golongan-golongan elit lainnya. Persebaran otoritas dalam pengelolaan pendidikan mengalami penggelembungan pada kategori tersebut, seharusnya otoritas-otoritas absolut tersebut dihentikan dengan jalan pemerataannya pada kategori masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Masyarakat, Demokratisasi, Pendidikan

Keywords:

Masyarakat;
Demokratisasi;
Pendidikan;

Coresponden author:

Email: zaenalakhmad64@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-4.0

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia tergolong ke dalam klasifikasi kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah di bawah negara-negara asia lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Jepang. Bahkan perkembangannya dari tahun ke tahun kian merosot dan sangat memprihatinkan. Lemahnya kualitas sumber daya manusia hasil pendidikan di Indonesia berdampak negatif pada sektor-sektor pembangunan yang lain. Oleh karenanya pendidikan selain sebagai alat vital pengendali pembangunan juga menjadi prasyarat utama bagi sebuah bangsa untuk dapat bergerak lebih maju. Hal ini dapat kita lihat dari Jepang, setelah kalah total dalam perang dunia ke II, arah kebijakan yang ditempuh lebih menekankan aspek pembangunan kualitas sumber daya manusia ketimbang sektor pembangunan yang lainnya. Kini Jepang sudah dapat bersaing dengan negara-negara Asia, Eropa, bahkan negara-negara di dunia. walaupun negara ini memiliki keterbatasan sumber daya alam. Dengan bekal kualitas sumberdaya manusia yang handal mereka mampu menerapkan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai latar belakang kemajuan pembangunan negara itu.

Untuk itu pemerintah telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam mengatasi problema tersebut. Salah satu jalan yang ditempuh dengan membuat undang-undang baru tentang sistem pendidikan nasional. UU No.20 tahun 2003 ini diharapkan mampu mewujudkan agenda reformasi bidang pendidikan yang kita harapkan mampu memecahkan masalah keterpurukan kualitas sumberdaya manusia hasil pendidikan. Sejalan dengan hal ini, paradigma baru tentang pembangunan kualitas sumberdaya manusia menempatkan manusia sebagai subyek bukan menjadi obyek pembangunan. Dengan demikian partisipasi masyarakat sebagai wujud nyata dari demokratisasi pendidikan diharapkan nantinya dapat ditingkatkan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal (8) Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1989, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Kesadaran akan pentingnya demokratisasi pendidikan disertai dengan asumsi yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan basis *stakeholder* dan *user* pendidikan, dengan posisi ini tentunya masyarakat sadar dan tahu benar akan kebutuhan-kebutuhannya dalam melaksanakan program-program pendidikan. Beberapa tahun terakhir ini, dewan pendidikan dan komite sekolah telah melaksanakan serangkaian tugas-tugas untuk mewujudkan upaya demokratisasi ini, namun yang menjadi pertanyaan penting kemudian bahwa apakah kedua perangkat ini mampu mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan ?. Dibalik keraguan ini, masyarakat mendapatkan penilaian yang sama bahwa benarkah masyarakat telah mampu memainkan peran penting setelah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi pendidikan. Serta bagaimana kesiapan pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan dengan aspek pendidikan?. Kenyataan telah menyampaikan pesan kepada kita bahwa sebahagian besar metode belajar mengajar yang dilakukan dikelas masih belum menciptakan nilai-nilai yang demokratis, tenaga pengajar umumnya bertindak sebagai orang yang paling tahu persoalan dalam mempelajari ilmu pengetahuan bahkan biasanya bertindak otoriter untuk menutupi kekurangannya. Padahal kita menyadari sepenuhnya, proses belajar mengajar pun sangat berpengaruh terhadap kualitas pelajar. Sistem yang demokratis akan menempatkan segala hal menjadi sangat relatif dengan demikian kehendak untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya akan menjadikan peserta didik lebih pro aktif dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ini hanyalah salah satu poin terkecil dari sekian banyak hal dalam sistim pendidikan yang perlu untuk didemokratisasikan.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah survei, yaitu dengan terjun langsung ke obyek penelitian, sedangkan tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan tentang sejauhmana paradigma masyarakat terkait Demokratisasi Pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bulukumba. Pemilihan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki konsistensi yang relatif tinggi dalam hal pembangunan kualitas sumberdaya manusia bidang pendidikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Penarikan sampel dari populasi tersebut menggunakan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan sengaja yang didasarkan menurut uraian bidang, tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur yang terkait dengan pendidikan di lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang relevan serta melalui lembaga terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang langsung pada obyek penelitian. Pengumpulan data dilapangan dapat dilakukan melalui Wawancara dan Observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman yang keliru tentang Demokrasi Pendidikan

1. Demokrasi Pendidikan di pahami secara Parsial

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, mereka memahami bahwa demokratisasi pendidikan “sebagai kebebasan yang diberikan kepada unit pendidikan untuk menentukan visi dan misi guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Ia juga menilai demokratisasi pendidikan memiliki prospek yang sangat baik, manajemen pendidikan berbasis sekolah dan pemangkasan jalur bantuan dana dari pemerintah pusat langsung kepada satuan pendidikan atau komite sekolah akan semakin memperkecil tingkat kebocoran dan manipulasi”, adalah beberapa contoh kebaikan dari demokratisasi pendidikan yang sempat ia ungkapkan. Tetapi Muh. Arsal tidak ingin melupakn sisi negatif dari sintim tersebut, baginya “demokratisasi pendidikan dengan pelibatan masyarakat secara berlebihan di dalamnya akan menjadi sebuah masalah baru bagi manajemen pendidikan”. Syamsiah menambahkan “demokratisasi pendidikan memiliki potensi korelasi yang kuat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara tidak langsung, pasalnya dengan sistem ini kita dapat mengatur sebuah mekanisme bagi manajemen pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya”. Walau demikian, kenyataan di Kabupaten Bulukumba tetap mengindikasikan sebuah gejala tentang pemahaman masyarakat pada demokratisasi pendidikan secara tidak utuh bahkan jumlah masyarakat yang paham dengan konsep tersebut masih sangat langka. Bagi masyarakat luas, demokratisasi pendidikan di pahami hanya sebatas pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan lewat komite sekolah dan dewan pendidikan. Bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat pun masih belum di pahami, keterlibatan masyarakat yang dapat di wujudkan hanya sebatas aspirasi dalam persoalan penganggaran, kondisi ini tentunya menempatkan komite sekolah tidak lebih sebagai metamorfosis lembaga terdahulu (BP3). Demokrasi pendidikan belum di pahami secara hakiki, padahal demokratisasi pendidikan di tempuh oleh pemerintah dengan harapan memiliki relevansi yang kuat dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia hasil pendidikan.

Dengan asumsi ini maka tiada alasan bahwa demokratisasi pendidikan secara hakiki harus mampu menyentuh obyeknya secara lebih dekat dan mendalam. Jika siswa adalah fokus utama dalam proses pendidikan maka demokrasi pendidikan harus mampu menempatkan siswa sebagai aktor-aktornya. Namun yang terjadi adalah sosialisasi tentang konsep demokratisasi pendidikan belum sampai pada siswa selaku salah satu aktor terpenting dalam mewujudkan demokrasi dalam bidang pendidikan, seharusnya demokrasi juga merasuk sampai pada aktivitas belajar mengajar di mana terjadi interaksi yang harmonis antara komponen pendidik dan komponen yang akan dididik. Partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar relatif berpengaruh besar terhadap kualitasnya, sayang sekali pemahaman peserta didik tentang demokrasi pendidikan sangat kurang. Konsep-konsep dasar tentang teori demokrasi tidak di pahami secara baik, seperti kurangnya pemahaman masyarakat masyarakat dan peserta didik tentang teori kebebasan dan teori keadilan demokrasi yang seara langsung dapat berpengaruh pada tingkat manifestasinya.

Pemahaman masyarakat hanya sebatas pengetahuan tentang eksistensi kelembagaan demokrasi pendidikan. Eksistensi demokrasi pendidikan dengan pemahaman seperti itu bukan merupakan angin segar bagi penguatan kelembagaan demokrasi pendidikan, kedua lembaga seperti komite sekolah dan dewan pendidikan belum mampu memaksimalkan perannya apalagi berharap bahwa lembaga ini mampu mempengaruhi seluruh stake holders yang lain untuk memainkan perannya dengan baik. Kondisi ini tentunya sangat merugikan, masyarakat dalam arti yang luas selaku aktor-aktor bagi demokrasi belum sepenuhnya memahami batasan-batasan perilaku mereka kedalam bingkai demokrasi, ironinya justru masyarakat sulit menumbuhkan kasadaran terhadap pembangunan pendidikan. Terdapat beberapa alasan rasional sehingga hal itu dapat terjadi diantaranya di sebabkan oleh opini yang dominan dan berkembang dalam masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia mengarah kepada hal yang negatif. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan tidak memiliki relevansi yang kuat dengan lapangan kerja, orientasi masyarakat umumnya adalah perbaikan sektor ekonomi keluarga ketimbang orientasi untuk menimba ilmu dan pengetahuan maka tak heran banyak masyarakat (dalam beberapa kategori) menganggap sekolah tidak lebih dari sekedar lembaga formal untuk mendapatkan penilaian secara administratif dan formal yang sangat di butuhkan dalam dunia kerja, padahal dunia kerja tidak memerlukan penilaian administratif yang berlebihan melainkan memerlukan profesionalisme dengan tingkat kematangan keilmuan yang cukup untuk menggerakkan sektor-sektor modal dalam dunia kerja secara evktif dan efisien. Terjadinya kecurangan-kecurangan pada seleksi menuju dunia kerja cukup memperkeruh suasana dan membentuk opini negatif masyarakat secara berlebihan terhadap pembangunan pendidikan, maka tak heran jika orangtua siswa dalam memberikan motivasi kepada anaknya telah meninggalkan orientasi pendidikan secara hakiki. Menurut Hj. ST. hasanah “kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan utamanya di pedesaan turut campur dalam persoalan tersebut”⁴. Pendek kata, bahwa sebenarnya pemahaman masyarakat yang kurang terhadap upaya pembangunan pendidikan sebagai dampak dari ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Menurut Muh. Dachlan S “dewan pendidikan memiliki andil yang cukup dalam membalik paradigma masyarakat yang sangat sempit dan negatif terhadap pembangunan pendidikan. Era demokrasi pendidikan adalah sesuatu yang baru untuk itu tetap diperlukan waktu yang panjang menuju tatanan yang lebih baik. Ia menambahkan bahwa sampai saat ini dewan pendidikan telah berupaya menjadi mediator untuk mensinergikan seuruh kekuatan kekuatan yang dimiliki oleh masing masing komponen masyarakat melalui metode sosialisasi dari golongan masyarakat atas sampai pada golongan masyarakat paling bawah untuk meningkatkan pola manajemen pendidikan demokratis serta menumbuhkan perhatian masyarakat tentang pembangunan pendidikan”. Sementara itu Hasan Abdullah menjelaskan bahwa “demokratisasi pendidikan adalah sesuatu yang sangat baik, hanya saja masyarakat

selalu menganggap segala urusan adalah milik pemerintah, asumsi ini mempengaruhi pola tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan pendidikan menjadi menurun”

2. Persebaran pemahaman masyarakat tentang demokratisasi pendidikan

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi pendidikan saat ini memang bersifat relatif. tingkat pemahaman masyarakat dan persebarannya dapat diamati lewat beberapa kategori segmen-segmen sosial :

a. Golongan Elite

Yang termasuk kedalam kategori ini adalah orang-orang kunci atau orang yang memiliki perhatian serius terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Kategori ini yang termasuk yang paling sedikit, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam berguliran wacana. Golongan ini memiliki tingkat pemahaman tentang demokratisasi pendidikan relatif baik, menurut H. Abdullah “demokratisasi pendidikan adalah suatu sistem pengelolaan pendidikan yang tidak sepenuhnya berada ditangan pusat, demokratisasi pendidikan dianggap sebagai suatu reaksi terhadap anggapan gagalnya sistem pendidikan sentralistik yang memicu tumbuhnya paradigma terbalik dari koindisi awal”⁷. Dilanjutkan pula oleh Kamaruddin Hasan bahwa “dengan sistem semacam itu memberi peluang bagi pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan pendidikan (proses dan pengambilan keputusan)”

Peran kategori sosial ini sangat diperlukan sebagai sentral perubahan, pergulatan wacana merupakan kontrol terbaik dan kelompok inilah yang lebih banyak berperan. Terdapat beberapa alasan mengapa kelompok ini memiliki status dan peran yang demikian penting bagi arah perubahan diantaranya ; 1) mereka memiliki tingkat keilmuan yang relatif cukup untuk menghasilkan rumus-rumusan yang dapat dianggap terbaik dalam wilayah tersebut, andaikan hal itu tidak terpenuhi, pasti orang-orang tersebut memiliki pengalaman khusus yang membuatnya berbeda dengan yang lainnya; 2) status dan peran yang mereka miliki menuntutnya untuk memberi waktu yang lebih besar untuk memikirkan pembangunan pendidikan kearah yang lebih baik. Mereka umumnya memiliki wewenang sebagai legalitas dalam memberi pengaruh dan mengambil keputusan; 3) kemampuan meraih kepercayaan masyarakat; 4) kemampuan mendapatkan legalitas atas kharisma-kharisma yang tidak dimiliki orang lain; 5) atau karena kepentingan yang sedang dimainkan.

Hanya saja menurut Sahabuddin Saleh bahwa “pola perekrutan keanggotaan pada kelembagaan demokrai pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada orang-orang kunci di Kabupatebn Barru sedikit menuai hambatan, orang-orang tersebut paling tidak berasal dari instansi yang berbeda-beda. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip profesionalisme pada kelembagaan demokrasi pendidikan”.

b. Golongan Masyarakat Awam

Yang dimaksud pada kategori ini adalah orang-orang yang tidak mampu mendapatkan dan memainkan perannya dalam pembangunan pendidikan. Umumnya mereka lebih terkonsentrasi pada urusan-urusan yang lain, secara tidak langsung mereka menjatuhkan kepercayaan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kompetensi. Tingkat pemahaman mereka terhadap demokratisasi pendidikan sebagai sebuah upaya menuju pembangunan pendidikan yang lebih baik berada pada lefel terendah dan bahkan dapat saja bertentangan dengan keputusan yang ditempuh oleh golongan elite¹⁰. Tipe masyarakat ini memiliki opini negatif terhadap demokratisasi pendidikan. Asumsi yang biasanya mereka pertahankan adalah demokaratisasi pendidikan hanyalah konsep yang

menjastifikasi dewan pendidikan dan komite sekolah untuk menerapkan praktek-praktek komersialisasi pendidikan. Mereka dapat merasakan semakin mahal biaya pendidikan disisi lain mereka harus berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang masih rapuh

c. *Golongan Pelaksanaan Pendidikan Lainnya*

Kategori ini adalah orang-orang yang tidak memiliki posisi strategis dan kompetensi dalam pengolahan wacana, tetapi mereka ikut melihat secara langsung dalam pelaksanaan pendidikan. Mereka sudah mampu menilai demokrasi pendidikan secara positif tetapi belum memiliki pemahaman mendalam tentang demokrasi pendidikan secara hakiki, sehingga dalam implementasinya sebagai pelaksana teknis pendidikan, mereka relatif tidak mampu mewujudkan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

d. *Golongan Masyarakat yang dididik*

Yang termasuk dalam kategori ini adalah siswa-siswa atau pelajar. Pemahaman mereka tentang demokrasi pendidikan umumnya bertingkat-tingkat, untuk kategori sekolah dasar pemahaman mereka tentang demokrasi pendidikan sangatlah rendah atau bahkan tidak ada, mereka cenderung menjadi obyek dalam aktifitas pendidikan. Menurut Hasan Galib “pada kategori sekolah lanjutan, kebutuhan terhadap demokratisasi pendidikan secara spesifik lewat proses belajar mengajar telah tumbuh dari sebuah kesadaran menjadi kebutuhan, akan tetapi pemahaman mereka tentang demokratisasi pendidikan masih sangat sempit mereka memahami demokratisasi pendidikan lewat eksistensi dewan pendidikan dan komite sekolah serta pada kehadiran kurikulum berbasis kompetensi, akan tetapi dalam praktek penyusunan kurikulum berbasis kompetensi mereka tidak pernah dilibatkan”¹³. Mereka umumnya belum memahami peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya adalah kategori sekolah tinggi, umumnya sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Bulukumba adalah Swasta, sedangkan yang lebih nampak adalah bahwa wujud perhatian demokratisasi pendidikan terlihat jelas pada sekolah-sekolah negeri. Kondisi ini memiliki andil yang besar dalam proses sosialisasi. Menurut Drs. M. Syatir Abbas, MH. Menyatakan, kenyataan ini menyebabkan tingkat pemahaman pada kategori sekolah tinggi masih sangat rendah terhadap demokratisasi dibidang pendidikan. Walau demikian, praktek-praktek demokratisasi pendidikan sudah ada yang mereka terapkan, bahkan arah perubahan sistem pendidikan saat ini disinyalir mengarah kepada kebaikan-kebaikan pengelolaan pendidikan swasta.

Persebaran pemahaman tentang demokratisasi pendidikan secara tidak merata seperti telah dikemukakan diatas menjadi salah satu penghabat dalam pelaksanaannya. “Pada posisi ini dewan pendidikan Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan aktifitasnya baru sebatas sosialisasi wacana dan penyatuan seluruh simpul-simpul kekuatan dalam masyarakat yang berbeda-beda”¹⁶ ungkap H. Muh. Dachlan S.

B. Paradigma masyarakat tentang pembangunan pendidikan

Walaupun demokratisasi pendidikan telah ditempuh menjadi sebuah keputusan dalam pengelolaan pendidikan, akan tetapi paradigma masyarakat tentang pendidikan belum mengalami perubahan yang signifikan. Mereka berpandangan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi, tetapi menuju proses pemenuhan itu mereka kurang mampu memposisikan diri sebagai subyek dalam pembangunan pendidikan. Mereka cenderung statis, positif dan menjadi fokus kebijakan yang kadangkala dianggap sangat merugikan. Menurut H. Abdullah bahwa, “ skala pemenuhan

prioritas pada fasilitas pendidikan oleh orang tua relatif tidak menenpati tata urutan pemenuhan kebutuhan yang utama. Hal ini tentunya mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih sangat rendah”. Setidaknya terhadap beberapa kondisi yang menjadi pemicu keadaan itu :

1. Lingkungan yang berubah ataukah masyarakat yang berubah terhadap orientasi pendidikan.

Yang menjadi persoalan kemudian bahwa paradigma yang statis tersebut berada pada posisi yang sangat merugikan. Tidak jelas penyebabnya, apakah karena tuntutan lingkungan ataukah karena masyarakat yang berubah, yang jelas kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan diliputi oleh perasangka yang buruk dalam pengelolannya. Proses input pengetahuan dan ilmu pengetahuan telah dikalahkan oleh mekanisme input pada lingkungan, pengaruh lingkungan terhadap seseorang peserta didik jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh lembaga sekolah. Kemerosotan moral misalnya sebagai salah satu indikator kualitas telah gagal ditanamkan oleh lembaga pendidikan, banyak yang menilai moral saat ini mengalami degradasi. Benarkah hal tersebut terjadi ?, ataukah konsep kita tentang moral tetap statis sedangkan tuntutan lingkungan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ini baru merupakan salah satu variabel yang dapat dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya lembaga pendidikan kita tidak adaptif dan fleksibel. Pada proses input ditemukan sebuah kegagalan pada lembaga pendidikan, lembaga pendidikan juga kalah terhadap mekanisme pembelajaran yang disajikan oleh lingkungan secara lebih demokratis, dapat dicontohkan misalnya seorang anak yang belajar otomotif pada lingkungan dan yang belajar disekolah memiliki tingkat keterampilan dan penguasaan yang berbeda, tetapi mengapa lembaga pendidikan tidak dapat mendominasi lingkungan. Mungkin terdapat sebuah asumsi bahwa sebenarnya mekanisme input variabel-variabel pendidikan di sekolah harus dibuat lebih menarik minat seperti yang dilakukan di lingkungan, menurut Djamaluddin, “ terdapat sebuah kebaikan dari demokratisasi pendidikan yaitu adanya kurikulum yang berbasisi Like Skill yang memungkinkan seorang anak dapat mempelajari segala sesuatu berdasarkan minat dan bakatnya”¹⁸. Selain itu belajar di lingkungan memiliki tingkat relevansi dengan dunia kerja jauh lebih besar. Walaupun demikian tetap diakui bahwa mekanisme input pada lingkungan juga memiliki dampak negatif yang lebih besar, tergantung pada setiap personal dalam melakukan filtrasi untuk dirinya. Selain mekanisme input, mekanisme output pendidikan pun mengalami kemerosotan. Jika dilingkungan seseorang dapat belajar sambil bekerja, maka dilingkungan sekolah terdapat kesenjangan diantara kedua persoalan kedua tersebut. Padahal setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk memperkuat ekonominya sendiri, sekolah tidak menjamin tersediannya lapangan kerja yang cukup bagi keluaran-keluarannya.

Tidak berhenti sampai disitu, kecurangan-kecurangan yang menghantui keluarga lembaga pendidikan atas persaingan yang tidak sehat untuk menuntut dunia kerja berdasarkan kolusi dan nepotisme yang saat ini bukan lagi menjadi rahasia publik semakin memperkeruh suasana. Kondisi ini mau tidak mau berdampak negatif terhadap paradigma masyarakat tentang pembangunan pendidikan.

2. Kesadaran terhadap pemenuhan kualitas sumber daya manusia hasil pendidikan yang terpuruk.

Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan kualitas pada proses input bukanlah menjadi tuntutan utama. Persoalan prestise juga masih dipertahankan, seorang anak yang tidak lulus misalnya

dianggap mencemarkan nama baik orang tua dan keluarga, dan tidak dianggap sebagai feed back bagi peningkatan kualitas sehingga seorang anak dapat lulus dengan lebih baik. Selain itu faktor-faktor lain juga ikut berperan serta dalam persoalan ini seperti; tuntutan ekonomi, tuntutan dunia kerja sesegera mungkin, dan kecurangan-kecurangan dalam mekanisme perekrutan dalam dunia kerja ikut berpengaruh pada kemerosotan kesadaran tersebut.

Kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan belum didasari pada kesadaran konsekuensi logis yang ditimbulkannya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memnuhi fasilitas pendidikan anaknya selalu menjadi prioritas yang kurang diperhatikan ketimbang pemenuhan fasilitas pada sektor-sektor yang lainnya. Walaupun kondisi ini tidak merata untuk semua lingkungan keluarga, tetapi pada kelas masyarakat awam fenomena ini menjadi sebuah realitas yang paling muda dan sering ditemui, sedangkan menurut H. Dachlan S, “ Peningkatan sarana pendidikan memiliki korelasi dengan tingkat kualitas sumber daya manusia yang dapat dihasilkan”.

3. Pemahaman tentang konsep kualitas sumber daya manusia hasil pendidikan yang tidak utuh.

Pemahaman terhadap konsep kualitas yang dimaksud mungkin memiliki relevansi terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Selama ini konsep kualitas sumber daya manusia hasil pendidikan selalu ditunjukkan lewat perwakilan angka-angka secara matematis, akan tetapi kadang-kadang tidak semua hal dapat diwujudkan dengan angka-angka secara matematis, jika seorang siswa atau pelajar sudah mampu menunjukkan angka-angka hasil pendidikannya yang lebih baik biasanya telah dianggap sebagai orang yang memiliki tingkat kualitas yang lebih baik. Padahal dalam pemberian nilai kadang-kadang selalu terkait dengan subyektifitas penilaian, walaupun demikian para pemberi nilai sudah menganggap sangat obyektif. Akan tetapi segala hal yang telah melalui penilaian manusia tidak ada lagi yang bersifat obyektif melainkan bersifat subyektif.

Menurut H.Dachlan S “Konsep kualitas yang dipahami oleh masyarakat secara luas memang masih belum lengkap. Ukuran-ukuran kualitas yang dipahami oleh masyarakat terkait dengan tingkat penguasaan mata pelajaran lewat nilai-nilai, dan bukan melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan yang diamalkan dalam lingkungan masyarakat”²⁰. Biasanya juga ukuran kualitas yang dipahami oleh masyarakat adalah kemampuan penguasaan mata pelajaran tertentu seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Mata pelajaran yang lain kadang-kadang mendapat posisi yang lebih rendah dari mata pelajaran yang lainnya, jangan heran jika opini yang berkembang dalam masyarakat jika seorang anak bisa mampu masuk ke jurusan MIPA biasanya lebih dianggap cerdas ketimbang anak yang masuk ke jurusan sosial. Penjurusan seperti ini telah mengalami kekeliruan. H.Rahim Yusuf menilai “penjurusan hendaknya berdasar pada minat, bakat dan kehendak seorang peserta didik dan bukan berdasar pada pembentukan opini yang memarginalkan bidang-bidang yang lainnya”²¹. Biar bagaimana pun konsep kualitas yang utuh adalah kemampuan penguasaan beberapa bidang sekaligus secara harmonis. Dapat dicontohkan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang lewat teknologi akan menuai dampak negatif jika tidak dibarengi dengan ilmu dan pengetahuan moral. Konsep kualitas yang utuh tidak lain merupakan penguasaan dan kemampuan mengamalkan pentingnya konsep interdisipliner dalam proses input dan output pendidikan, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang peserta didik memiliki keahlian tertentu berdasarkan minat dan bakat yang ada pada dirinya.

KESIMPULAN

Paradigma Masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tentang upaya demokratisasi pendidikan belum menyentuh wilayah hakiki dari konsep demokrasi. Demokrasi yang sesungguhnya adalah milik masyarakat luas secara utuh dan bulat. Tetapi desentralisasi pendidikan sebagai salah satu upaya dari konsep demokrasi untuk menyentuh subyeknya secara benar dan hakiki belum mampu diwujudkan. Demokratisasi pendidikan khususnya di Kabupaten Bulukumba tetap berbau sentralisasi manajemen pendidikan kedaerahan masih menjadi milik pemerintah daerah dan golongan-golongan elit lainnya. Persebaran otoritas dalam pengelolaan pendidikan mengalami penggelembungan pada kategori tersebut, seharusnya otoritas-otoritas absolut tersebut dihentikan dengan jalan pemerataannya pada kategori masyarakat secara luas.

Masyarakat secara luas khususnya di Kabupaten Bulukumba sangat menyayangkan sebuah konsep yang dinilai lebih baik dari konsep sebelumnya belum mampu mencapai sebuah solusi yang benar-benar berarti. Proses menuju upaya demokratisasi tersebut malah mengalami penyimpangan akibat penafsiran konsep demokrasi secara sempit dan dangkal ; kapitalisme pendidikan, komersialisasi pendidikan adalah berupa wujud kamufase yang salah dari demokratisasi pendidikan. Walaupun demikian masyarakat luas tetap optimis, mereka pada umumnya menilai persoalan utama dari manajemen pendidikan secara demokratis tidak lagi berada pada tataran konsep melainkan pada tataran implementasinya. Jika masyarakat telah sampai kepada kemapanan baik terhadap konsep demokrasi dan implementasinya maka aktivitas problem solving akan terjawab dengan berimbang bagi upaya pembangunan pendidikan serta kedua variabel demokratisasi dan problem solving akan mengalami penguatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Idochi Moch. 2003. *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori Konsep Dan Issu)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Erik Lane, Jan dan Ersson, Svante. 2002. *Demokrasi dan Pertumbuhan, Benarkah Kontradiktif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardjito, Dydiet. 2003. *Pemecahan Masalah Yang Analitik (Analytical Problem Solving) Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*. Jakarta:Prenada Media.
- Islamiy, Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nogi Hessel, S. Tangkilisan. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Naget*. Yogyakarta : Balairung & CO.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokrasi “Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan”*. Jakarta: Kencana.
- Rosyada, Imran dan Nastain, Muhammad. 2001. *Kebohongan Demokrasi*. Yogyakarta : Institut Tafsir Wacana dan Penerbit Wacana.
- Suryosubroto,B. 2004. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafeii, Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung : Refika Aditama.